



KONASARA II

# RENJA 2022

“Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN 2021**



**Pemerintah Kabupaten Konawe Utara**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2021**

Jl. Lintas Timur Sulawesi (Trans Sulawesi), Komp. Perkantoran Pemda Kab. Konawe Utara Kel.  
Wanggudu - Kec. Asera 93353  
dpmptspkabkonut@gmail.com



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026, menjadi bahan materi musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Konawe Utara guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dan Rancangan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Hasil Rapat Pembahasan Rencana Kerja Lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungannya kepada kita semua, sekian dan terima kasih.

Wanggudu, 5 April 2021

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**MARJONO, S.Pd., M.Si**

Pembina TK.I, Gol. IV/b

NIP. 19690810 200502 1 010

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Landasan Hukum .....	3
	C. Maksud dan Tujuan .....	4
	D. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
	C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	25
	D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	27
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>35</b>
	A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	35
	B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	34
	C. Program dan Kegiatan .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
	A. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	42
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1	Keterkaitan Renja Dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L Dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota .....	2
Gambar 2.1	Anggaran Tahun 2021 .....	8
Gambar 2.2	Serapan Anggaran Tahun 2021 .....	9
Gambar 2.3	Capaian Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	10
Tabel 2.1	Form Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya .....	11
Gambar 2.4	Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	18
Tabel 2.2	Jenis Izin yang di Keluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	19
Tabel 2.3	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Konawe Utara .....	22
Tabel 2.4	Data LKPM Persektor/Jeis Usaha/KBLI (Kalisifikasi Baku Usaha Indonesia) Periode Triwulan IV Tahun 2021 .....	23
Tabel 2.5	Form Analisis Pencapaian Indikator Perangkat Daerah Terhadap Target dan Realisasi .....	24
Tabel 2.6	Form Perbandingan Kebutuhan Ranwal RKPD dan Analisi Kebutuhan Renstra Perangkat Daerah .....	28
Tabel 2.7	Form Usulan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran pada Perangkat Daerah .....	34
Tabel 3.1	Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	35
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran .....	37
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

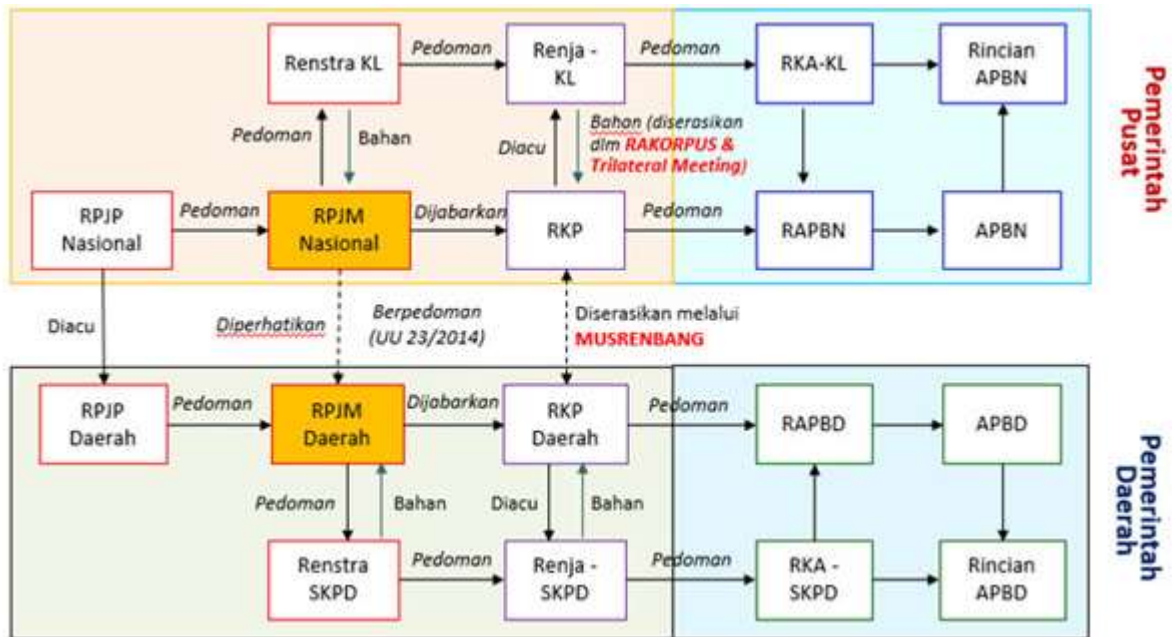
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan harmonisasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Forum OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe Utara. Berikut disajikan gambar keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota :

Gabar 1.1

Keterkaitan Renja Dengan Dokumen RKP, Renstra, Renja K/L Dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota



Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan rencana kerja.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKP dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKP, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Rencana Kerja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.



## 1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012-2032;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2022;
2. Memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan untuk tahun rencana berjalan;
3. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

4. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2022 dan DPA OPD Tahun 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **B. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **A. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian/review terhadap :**

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2021) berdasarkan LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah disahkan

3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Berisikan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan :
1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau
  2. Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah)
  3. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh OPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap capaian program dan kegiatan seperti SPM, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindak lanjuti.
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra), serta penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi perangkat daerah
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah
- C. Program dan Kegiatan
- Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misalnya pencapaian visi dan misi kepala daerah (IKU Daerah), pengentasan

kemiskinan, pencapaian SPM, pencapaian IKU Perangkat Daerah, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan kewilayahan.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 perangkat daerah

#### BAB V PENUTUP

Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut dan catatan penting lainnya.

## BAB II

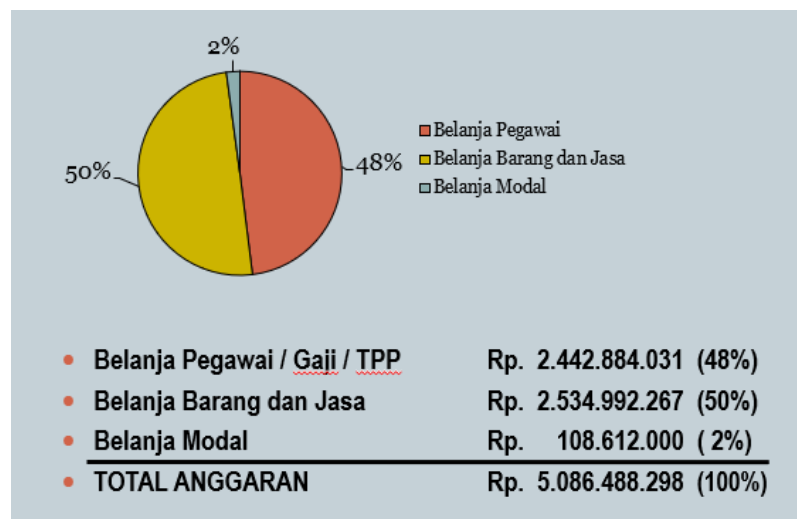
### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kedudukan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2021.

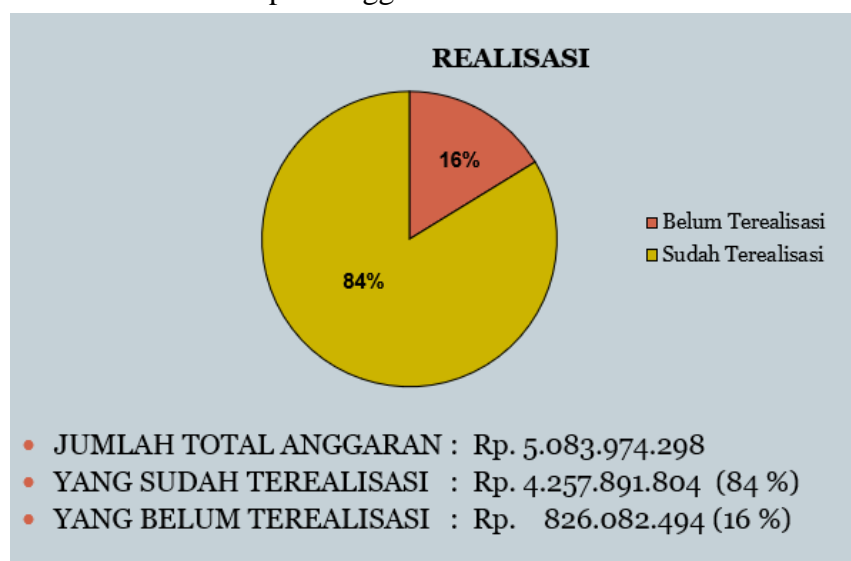
Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 5.086.488.298,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sejumlah Rp 4.977.876.298,00 dan Belanja Modal sejumlah Rp. 108.612.000,00.

Gambar 2.1  
Anggaran Tahun 2021



Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp. 2.442.844.031 dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 2.534.992.267. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 84.612.000 dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp. 24.000.000. Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara juga memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) senilai Rp. 322.573.000 untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dan pada Maret 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe akibat adanya Pandemi Covid 19, mengalami Refocusing Anggaran senilai Rp. 287.406.767 atau sebesar 9,97%,

Gambar 2.2  
Serapan Anggaran Tahun 2021



Masih kurangnya serapan anggaran tahun 2021 di akibatkan oleh karena Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara masih kurang baik dalam kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas yakni masih lambannya ASN pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan hingga mengakibatkan lambatnya pengurusan atau proses pencairan anggaran. Secara kuantitas yakni masih kurangnya jumlah ASN yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sehingga menyebabkan kurang efektifnya program dan kegiatan untuk dijalankan atau dilaksanakan.

Secara umum didalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara belum memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tersebut harus dilakukan perbaikan guna mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kekurangan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Implikasi yang timbul terhadap kurangnya capaian Program dan Kegiatan pada tahun 2021, maka secara otomatis akan mengurangi capaian target Renstra. Dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantara lain :

1. Lebih teliti dalam pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan pada tahun sebelumnya.

Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 untuk mendukung Sasaran Strategis yang hendak dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yakni Rp. 734.500.914,- dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 2.3  
Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
I.	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	60	56	93,33%	441.201.000	322.043.400	72,99	32,88
		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	220 Milyar	744,69 Milyar	354,36%				
II.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	293.299.914	170.958.914	58,29	
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	100%	100%	100%				
		Rasio Izin yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%				
<b>Rata – Rata Tingkat Capaian</b>					<b>149,54%</b>	<b>734.500.914</b>	<b>493.002.314</b>	<b>67,12</b>	

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Kinerja mencapai 149,54% dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program pendukung Sasaran Strategis adalah 67,12% dengan tingkat efisiensi 32,88%



Tabel 2.1 Form Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara									Lembar : .....	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (intermediate)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2.18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Daerah	<b>BB/WTP</b>	<b>B / WTP</b>	<b>BB / WTP</b>	<b>B / WTP</b>	<b>85%</b>	<b>BB / WTP</b>	<b>B / WTP</b>	<b>46,26%</b>
2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)	<b>BB / B</b>	<b>B / C</b>	<b>BB / B</b>	<b>B / C</b>	<b>-</b>	<b>BB / B</b>	<b>B / C</b>	<b>-</b>
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan RKA Perubahan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	60%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Sakip	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	60%
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan, Honorarium Pengelola Keuangan dan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	<b>150 Orang 60 Dokumen</b>	<b>30 Orang 12 Dokumen</b>	<b>30 Orang 12 Dokumen</b>	<b>30 Orang 12 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>30 Orang 12 Dokumen</b>	<b>90 Orang 36 Dokumen</b>	<b>60%</b>
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN DPM-PTSP	95 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	100%	19 Orang	57 Orang	60%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara									Lembar : .....	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (intermediate)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Penerima Honor Pengelola Keuangan	55 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	11 Orang	33 Orang	60%
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat</b>	<b>366 Stel Baju 40 Orang</b>	-	-	-	-	<b>30 Stel Baju 0 Orang</b>	<b>30 Stel Baju 0 Orang</b>	<b>8%</b>
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas, Adat dan Olahraga	366 Stel Baju	-	-	-	-	30 Stel Baju	30 Stel Baju	8%
2.18.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan OSS dan SiCantik	40 Orang	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket alat kelistrikan, peralatan, ATK, Makan Minum, Cetak, Penggandaan dan Laporan Koordinasi</b>	<b>20 alat kelistrikan, peralatan, 20 ATK, 20 Makan Minum, 20 Cetak, 20 Penggandaan, 16 Material dan 2.115 Laporan Koordinasi</b>	<b>4 alat kelistrikan, peralatan, 4 ATK, 4 Makan Minum, 4 Cetak, 4 Penggandaan, 4 Material dan 420 Laporan Koordinasi</b>	<b>4 alat kelistrikan, peralatan, 4 ATK, 4 Makan Minum, 4 Cetak, 4 Penggandaan, 4 Material dan 512 Laporan Koordinasi</b>	<b>4 alat kelistrikan, peralatan, 4 ATK, 4 Makan Minum, 4 Cetak, 4 Penggandaan, 4 Material dan 508 Laporan Koordinasi</b>	<b>99%</b>	<b>4 alat kelistrikan, peralatan, 4 ATK, 4 Makan Minum, 4 Cetak, 4 Penggandaan, 4 Material dan 446 Laporan Koordinasi</b>	<b>12 alat kelistrikan, peralatan, 12 ATK, 12 Makan Minum, 12 Cetak, 12 Penggandaan, 12 Material dan 1.374 Laporan Koordinasi</b>	<b>61%</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Alat kelistrikan	20 Paket Komponen Alat Kelistrikan	4 Paket Alat Listrik	4 Paket Alat Listrik	4 Paket Alat Listrik	100%	4 Paket Alat Listrik	12 Paket Alat Listrik	60%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket ATK dan 20 Paket Makanan	4 Paket ATK dan 4 Paket Makanan	4 Paket ATK dan 4 Paket Makanan	4 Paket ATK dan 4 Paket Makanan	100%	4 Paket ATK dan 4 Paket Makanan	12 Paket ATK dan 12 Paket Makanan	60%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan	20 Paket Cetak dan 20 Paket Copy Dokumen	4 Paket Cetak dan 4 Paket Copy Dokumen	4 Paket Cetak dan 4 Paket Copy Dokumen	4 Paket Cetak dan 4 Paket Copy Dokumen	100%	4 Paket Cetak dan 4 Paket Copy Dokumen	12 Paket Cetak dan 12 Paket Copy Dokumen	60%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara									Lembar : .....	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (intermediate)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang di Sediakan	70 Paket Bahan Bangunan	14 Jensi Bahan Bangunan	14 Jenis Bahan Bangunan	14 Jenis Bahan Bangunan	100%	14 Jenis Bahan Bangunan	14 Jenis Bahan Bangunan	60%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.115 Laporan	420 Laporan	512 Laporan	508 Laporan	99%	446 Lapoan	1.374 Laporan	65%
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>12 Unit Kendaraan, 37 Mebel, 24 Peralatan &amp; Mesin, 6 Sarpras</b>	<b>1 Unit Mobil, 4 Laptop, 4 Printer 1 Gedung Kantor</b>	-	-	-	1 Unit Pompa Air, 4 Unit Laptop, 4 Unit Printer	12 Unit Kendaraan, 0 Mebel, 9 Peralatan dan Mesin, 1 Sarpras	<b>15,75%</b>
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional	12 Unit	1 Unit Mobil	-	-	-	-	12 Unit Kendaraan	8%
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebbel	37 Mebel	-	-	-	-	-	0 Mebel	0%
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	24 Unit	4 Unit Laptop 4 Unit Printer	-	-	-	1 Unit Pompa Air, 4 Unit Laptop, 4 Unit Printer	9 Unit Perlatan dan Mesin	38%
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	6 Sarana dan Prasarana	1 Gedung Kantor	-	-	-	-	1 Sarpras	17%
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	1.100 Lembar Materai, 60 Bulan Tagihan Listrik, Internet, 25 Tenaga Front Office, 110 PPPK, 60 Bulan	250 Lembar Materai, 12 Bulan Tagihan Listrik, Internet, 5 Tenaga Front Office, 22 PPPK, 12 Bulan	250 Lembar Materai, 12 Bulan Tagihan Listrik, Internet, 5 Tenaga Front Office, 22 PPPK, 12 Bulan	250 Lembar Materai, 12 Bulan Tagihan Listrik, Internet, 5 Tenaga Front Office, 22 PPPK, 12 Bulan	<b>100%</b>	250 Lembar Materai, 12 Bulan Tagihan Listrik, Internet, 5 Tenaga Front Office, 22 PPPK, 12 Bulan	750 Lembar Materai, 36 Bulan Tagihan Listrik, Internet, 15 Tenaga Front Office, 66 PPPK, 36 Bulan	<b>64%</b>
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai & Benda Pos Lainnya	1.100 Lembar Materai	250 Lembar Materai	250 Lembar Materai	250 Lembar Materai	100%	250 Lembar Materai	750 Lembar Materai	68%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Bulan Listrik Internet dan Jasa Komunikasi Lainnya	60 Bulan Tagihan Listrik, Internet	12 Bulan Tagihan Listrik, 12 Bulan Internet	12 Bulan Tagihan Listrik, 12 Bulan Internet	12 Bulan Tagihan Listrik, 12 Bulan Internet	100%	12 Bulan Tagihan Listrik, 12 Bulan Internet	36 Bulan Tagihan Listrik, 36 Bulan Internet	60%



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara									Lembar : .....	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (intermediate)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM dan Peta Potensi Daerah	1 Dokumen RUPM	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Dokumen Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi</b>	<b>1 Dokumen, 8 Kegiatan Promosi 30 Potensi</b>	<b>2 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>1 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>1 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>100%</b>	<b>1 Dokumen, 1 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>1 Dokumen, 4 Kegiatan 18 Potensi</b>	<b>50%</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi</b>	<b>1 Dokumen, 8 Kegiatan Promosi 30 Potensi</b>	<b>2 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>1 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>1 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>100%</b>	<b>1 Dokumen, 1 Kegiatan 6 Potensi</b>	<b>1 Dokumen, 4 Kegiatan 18 Potensi</b>	<b>50%</b>
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategis Promosi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Jumlah Potensi Daerah yang di Promosikan	8 Kegiatan Promosi 30 Potensi	2 Kegiatan 6 Potensi	1 Kegiatan 6 Potensi	1 Kegiatan 6 Potensi	100%	1 Kegiatan 6 Potensi	4 Kegiatan Potensi	50%
<b>2.18.04</b>	<b>ROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>89,29 (Sangat Baik)</b>	<b>88,81 (Sangat Baik)</b>	<b>88,57 (Sangat Baik)</b>	<b>88,12 (Sangat Baik)</b>	<b>99,49% (Sangat Baik)</b>	<b>88,69 (Sangat Baik)</b>	<b>96,040 (Sangat Baik)</b>	<b>46,45%</b>
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>89,29 (Sangat Baik)</b>	<b>88,81 (Sangat Baik)</b>	<b>88,57 (Sangat Baik)</b>	<b>88,12 (Sangat Baik)</b>	<b>99,49% (Sangat Baik)</b>	<b>88,69 (Sangat Baik)</b>	<b>96,040 (Sangat Baik)</b>	<b>46,45%</b>
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Item ATK dan Makan Minum Petugas Front Office	1.126 Item ATK dan 6.000 Dos Makanan	214 Item ATK dan 420 Dos Makanan	265 Item ATK dan 635 Dos Makanan	244 Item ATK dan 635 Dos Makanan	98,86%	788 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	330 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	53,78%
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan Objek Perizinan	374 Kegiatan	-	-	-	-	88 Kegiatan	88 Kegiatan	24%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara									Lembar : .....	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (intermediate)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah ATK dan Makan Minum Petugas Layanan Pengaduan	205 Item ATK, 1.200 Dos Makan, 16 Item Cetak, dan 5 Kegiatan Rapat	26 Item ATK 2 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	26 Item ATK 2 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	26 Item ATK 2 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	100%	101 Item ATK 2 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	153 Item ATK 6 Item Cetak, dan 3 Kegiatan Rapat	68%
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Peraturan / SP /SOP yang tersinkronisasi	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
<b>2.18.05</b>	<b>ROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal</b>	<b>35 Dokumen, 1000 Peserta, 521 LKPM</b>	-	-	-	-	<b>7 Kegiatan 200 Peserta Bimtek, 45 Kegiatan</b>	<b>7 Kegiatan 200 Peserta Bimtek, 45 Kegiatan</b>	<b>12,66%</b>
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan, Jumlah Peserta Bimtek, Jumlah LKPM</b>	<b>35 Dokumen, 1000 Peserta, 521 LKPM</b>	-	-	-	-	<b>7 Kegiatan 200 Peserta Bimtek, 45 Kegiatan</b>	<b>7 Kegiatan 200 Peserta Bimtek, 45 Kegiatan</b>	<b>12,66%</b>
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Kegiatan Rapat Penyelesaian Masalah	35 Dokumen	-	-	-	-	7 Kegiatan	-	0%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Kegiatan Bimtek OSS dan LKPM	1.000 Peserta Bimtek	-	-	-	-	200 Peserta Bimtek	200 Peserta Bimtek	20%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan	254 Kegiatan	-	-	-	-	45 Kegiatan	45 Kegiatan	18%
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Jenis Layanan yang Dapat di Informasikan</b>	9 Media Informasi	1 Website	-	-	-	1 Pengembangan Website	2 Media	22%
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sistem Informasi yang di Gunakan	9 Media Informasi	1 Website	-	-	-	1 Pengembangan Website	2 Media	22%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara									Lembar : .....	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (intermediate)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Media Informasi	9 Media Informasi	1 Website	-	-	-	1 Pengembangan Website	2 Media	22%

## B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah penggantian nomenklatur dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya atau keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara selanjutnya mendapat kewenangan melakukan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Konawe Utara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.4  
Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Konawe Utara





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara hingga tahun 2021 telah dapat melayani total 73 jenis izin sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah di keluarkan dan dimaklumkan. Ke 73 jenis produk perizinan tersebut adalah :

Tabel 2.2  
Jenis Izin Yang Dikeluarkan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
1	Sektor Pendidikan	1	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
		2	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal
2	Sektor Kesehatan	1	Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D
		2	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D
		3	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
		4	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal
		5	Izin Klinik
		6	Izin Operasional Klinik
		7	Izin Operasional Puskesmas
		8	Izin Usaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) Dan (UKOT)
		9	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga
		10	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
		11	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT
3	Sektor Pekerjaan Umum	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi
		2	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
		3	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (non kecil dan kecil)
4	Sektor Perhubungan	1	Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		2	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
		3	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau
		4	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
		5	Izin Usaha Angkutan Laut
		6	Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai & Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek
		7	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Pelayanan Dalam Kabupaten)
		8	Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal
		9	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter
		10	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten dan/ atau jalan desa

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
5	Sektor Koperasi	1	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten
		2	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
6	Sektor Sosial	1	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
7	Sektor Ketenagakerjaan	1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
		2	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		3	Pengesahan Peraturan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten
8	Sektor Pertanahan	1	Izin Lokasi
9	Sektor Lingkungan Hidup	1	Izin Lingkungan
		2	Izin Pembunagan Limbah
		3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
10	Sektor Pariwisata	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )
11	Sektor Pertanian	1	Usaha Budidaya Perkebunan
		2	Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
		3	Izin Usaha Obat Hewan
		4	Izin Usaha Hortikultura
		5	Izin Usaha peternakan
		6	Pendaftaran Usaha Perkebunan
		7	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
		8	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura
		9	Pendaftaran Usaha Peternakan
		10	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman
		11	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
		12	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik
		13	Izin Pemasukan Agens Hayati
		14	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
		15	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
		16	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
		17	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu
		18	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
		19	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau
		20	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan
		21	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi
		22	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
		23	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian
		24	Pendaftaran Pakan Ternak
		25	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
		26	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman
		27	Perlindungan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman
		28	Pendaftaran Pestisida
		29	Pendaftaran Pupuk
		30	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan
12	Sektor Perikanan dan Kelautan	1	Izin perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
13	Sektor Perdagangan Dan Perindustrian	1	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan
		2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
		3	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C
		4	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan izin perluasan usaha Industri
		5	Izin usaha kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara khususnya pada Bidang Perizinan adalah memberikan jasa pelayanan perizinan yang dimana secara garis besarnya meliputi :

a. Penerimaan Permohonan Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara akan menerima berkas permohonan izin yang diajukan oleh pemohon selama berkas yang diberikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan lengkap.

b. Pemrosesan Permohonan Izin

Tahapan dalam pemrosesan izin yaitu melalui tahapan pengecekan kelengkapan berkas permohonan izin, bagi yang belum terdaftar atau mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yakni membuat akun pemohon dan mendaftarkan pada sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan selanjutnya melakukan input data usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau sektor yang dijalankan serta melengkapi input persyaratan yang diperlukan.

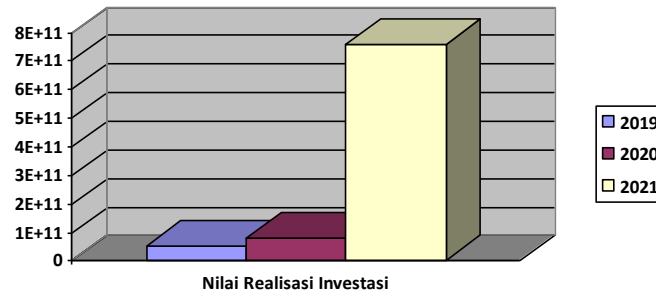
Kegiatan berikut yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Bidang Penanaman Modal adalah melakukan berbagai proses yang dijalankan pada Program dan Kegiatan guna

meningkatkan nilai investasi daerah serta meningkatkan iklim investasi, Program yang dijalankan dalam mendukung indikator kinerja tersebut diantaranya adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Konawe Utara dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 Dapat dikatakan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam menjalankan Program dan Kegiatan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3  
Perkembangan Nilai Investasi  
Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM
2019	Rp. 52.964.678.436	54 LKPM
2020	Rp. 79.822.558.294	51 LKPM
2021	Rp. 744.698.711.459	56 LKPM



Pada Tahun 2021, nilai realisasi investasi Rp. 744.698.711.459; melonjak dengan sangat signifikan disebabkan antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  
(Bab IX Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal Pasal 15 point c : membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal)
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

(Bab IV, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 7 point c :  
Setiap Pelaku Usaha Berkewajiban Menyampaikan LKPM)

- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

(Bab II, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 5 point c :  
Setiap Pelaku Usaha Berkewajiban Menyampaikan LKPM)

- d. Adanya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementrian Investasi Republik Indonesia untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan di daerah.

Tabel 2.4  
Data LKPM

Persektor / Jenis Usaha / KBLI (Klasifikasi Baku Usaha Indonesia)  
Periode Triwulan IV Tahun 2021

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)	PRESENTASE (%)
1.	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	511.998.031.462	68,83
2.	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	79.852.980.000	10,73
3.	Pertambangan Bijih Nikel	49.496.513.443	6,65
4.	Perkebunan Tebu	39.482.782.225	5,31
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik	25.810.895.249	3,47
6.	Kawasan Industri	15.685.292.080	2,11
7.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	13.020.000.000	1,75
8.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	5.738.415.000	0,77
9.	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	1.997.802.000	0,27
10.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	577.000.000	0,077
11.	Industri Air Minum Dan Air Mineral	389.000.000	0,052
12.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	300.000.000	0,04
13.	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	200.000.000	0,027
14.	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	150.000.000	0,02
<b>NILAI TOTAL REALISASI INVESTASI</b>		<b>744.698.711.459</b>	<b>100</b>

Sumber : Data LKPM Triwulan IV Tahun Tahun 2021 <https://oss.go.id>

Berikut disajikan pula pada tabel berikut yang menunjukkan target dan realisasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dipandang dari target Program Renstra Tahun 2019 s/d 2021 sebagai pembanding atau review tahun lalu.



### C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perizinan yang terjadi selama tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya di cabut dan di gantikan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mewajibkan proses pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau online melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Hal ini menjadikan pelayanan perizinan memerlukan jaringan internet yang kuat dan stabil, dimana kondisi Kabupaten Konawe Utara masih terbatas dalam penyediaan jaringan internet yang kuat dan stabil maka sering terkendala dalam proses pelayanan perizinan jika jaringan internet sedang tidak stabil.

2. Belum sempurnanya Sistem Online Single Submission (OSS) yang bisa di akses pada <https://oss.go.id>, dalam pengoperasiannya masih sering mengalami kendala.
3. Masih kurangnya kesadaran Pelaku Usaha/Investor dalam Pelaporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang wajib dilaporkan pertriwulannya pada Sistem Online Single Submission (OSS).
4. Belum efektifnya koordinasi teknis perizinan yang melibatkan Organisasi Perangkat Dinas Teknis dalam memberikan rekomendasi teknis.
5. Belum adanya regulasi tentang Kebijakan Penanaman Modal, terutama mengenai fasilitas, layanan dan jaminan bagi investor jika melakukan investasi di Kabupaten Konawe Utara.
6. Belum adanya peta potensi investasi daerah yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Konawe Utara.
7. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kualifikasi pengoperasian sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
8. Masih kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Sedangkan faktor-faktor pendorong dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara antara lain :

1. Sudah adanya Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan yang pada tiap tahunnya selalu dilakukan evaluasi untuk harmonisasi atau penyesuaian terhadap ketentuan atau kebijakan terbaru dari lembaga atau kementerian.
2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yang dihasilkan dari turunan Standar Pelayanan tersebut.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mewajibkan proses pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik yang membuat proses pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, efisien, efektif dan transparan.
4. Adanya maklumat pelayanan yang disusun, ditetapkan, dan dipublikasikan untuk bukti dan janji komitmen penyelenggara layanan, agar melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara layanan dengan baik, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yaitu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan investasi satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta terpublikasinya



informasi perizinan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Profil Perangkat Daerah dan Brosur Perizinan.

2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban perizinan di Kabupaten Konawe Utara.
4. Meningkatnya penggunaan pelayanan perizinan terpadu secara online dimasyarakat.

#### **D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Pada rancangan awal RKPD yang di usulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 terdapat 6 Program 13 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 6.828.444.272

Berikut disajikan tabel review terhadap rancangan RKPD Tahun 2022 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara :

Tabel 2.6 Form Perbandingan Kebutuhan Ranwal RKPD dan Analisis Kebutuhan Renstra Perangkat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.828.444.272	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.828.444.272	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.828.444.272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.828.444.272	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Konawe Utara	Presentase Tercapainya Sasaran Kegiatan	100%	5.745.441.333	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Konawe Utara	Presentase Tercapainya Sasaran Kegiatan	100%	5.745.441.333	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Konawe Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	13 Dokumen	40.720.863	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Konawe Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	13 Dokumen	40.720.863	
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wanggudu	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA	3 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wanggudu	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA	3 Dokumen	7.500.000	
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Wanggudu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	21.753.713	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Wanggudu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	21.753.713	
1.c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wanggudu	Jumlah Dokumen Sakip	9 Dokumen	11.467.150	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wanggudu	Jumlah Dokumen Sakip	9 Dokumen	11.467.150	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Konawe Utara	Opini BPK	WTP	2.464.854.809	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Konawe Utara	Opini BPK	WTP	2.464.854.809	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wanggudu	Terbayarnya Gaji Bulanan ASN	12 Bulan	2.312.749.071	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wanggudu	Terbayarnya Gaji Bulanan ASN	12 Bulan	2.312.749.071	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Wnggudu	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	138.990.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Wnggudu	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	138.990.000	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Sultra	Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan	4 Orang	7.085.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Sultra	Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan	4 Orang	7.085.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Wanggudu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12 Dokumen	6.030.738	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Wanggudu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12 Dokumen	6.030.738	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Seragam Dinas dan Diklat</b>	3 Set 23 Stel 5 Orang	<b>163.489.183</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Seragam Dinas dan Diklat</b>	3 Set 23 Stel 5 Orang	<b>163.489.183</b>	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Wanggudu	Jumlah Pakaian Dinas, Adat dan Olah Raga	3 Set 23 Stel	75.635.183	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Wanggudu	Jumlah Pakaian Dinas, Adat dan Olah Raga	3 Set 23 Stel	75.635.183	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nasional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	8 Orang	87.854.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nasional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	8 Orang	87.854.000	
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Presentase Terlaksananya Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1.375.967.737</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Presentase Terlaksananya Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1.375.967.737</b>	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wanggudu	Jumlah Alat-Alat Kelistrikan	12 Item	16.971.763	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wanggudu	Jumlah Alat-Alat Kelistrikan	12 Item	16.971.763	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wanggudu	Jumlah Peralatan Pendukung Operasional	18 Unit	215.809.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wanggudu	Jumlah Peralatan Pendukung Operasional	18 Unit	215.809.000	
4.3	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Wanggudu	Presentase Ketersediaan Perlatan RT	28 Item	86.410.652	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Wanggudu	Presentase Ketersediaan Perlatan RT	28 Item	86.410.652	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wanggudu	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket ATK 1 Paket Makan Minum	106.121.825	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wanggudu	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket ATK 1 Paket Makan Minum	106.121.825	
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wanggudu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Item Cetak dan 20.000 Lembar Foto Copy	26.750.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wanggudu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Item Cetak dan 20.000 Lembar Foto Copy	26.750.000	
4.6	Penyediaan Bahan/Material	Wanggudu	Jumlah Paket Bahan Bangunan	6 Item Bahan Baku Bangunan	34.417.497	Penyediaan Bahan/Material	Wanggudu	Jumlah Paket Bahan Bangunan	6 Item Bahan Baku Bangunan	34.417.497	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasional	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	135 Kegiatan	889.487.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasional	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	135 Kegiatan	889.487.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Penambahan Sarpras</b>	<b>4 Paket</b>	<b>600.755.563</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Penambahan Sarpras</b>	<b>4 Paket</b>	<b>600.755.563</b>	
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wanggudu	Jumlah Penambahan Kendaraan	4 Unit	110.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wanggudu	Jumlah Penambahan Kendaraan	4 Unit	110.000.000	
5.2	Pengadaan Mebel	Wanggudu	Jumlah Pengadaan Mebel	18 Unit	158.193.578	Pengadaan Mebel	Wanggudu	Jumlah Pengadaan Mebel	18 Unit	158.193.578	
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wanggudu	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	140.561.985	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wanggudu	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	140.561.985	
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wanggudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1 Koridor 1 Garasi 1 Paket Teralis	192.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wanggudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1 Koridor 1 Garasi 1 Paket Teralis	192.000.000	
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>258.443.178</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>258.443.178</b>	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wanggudu	Jumlah Materai	250 Lembar	2.531.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wanggudu	Jumlah Materai	250 Lembar	2.531.250	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wanggudu	Jumlah Tagihan Listrik dan Internet	12 Bulan	48.911.928	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wanggudu	Jumlah Tagihan Listrik dan Internet	12 Bulan	48.911.928	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wanggudu	Jumlah Jasa Tenaga PPKK	30 Orang	207.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wanggudu	Jumlah Jasa Tenaga PPKK	30 Orang	207.000.000	
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Sarpras yang Mengalami Pemeliharaan</b>	<b>3 Paket</b>	<b>841.210.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Sarpras yang Mengalami Pemeliharaan</b>	<b>3 Paket</b>	<b>841.210.000</b>	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wanggudu	Jumlah Perbaikan Kendaraan Operasional	19 Unit	172.340.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wanggudu	Jumlah Perbaikan Kendaraan Operasional	19 Unit	172.340.000	
7.2	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Wanggudu	Jumlah Pebaikan Perlatan	34 Unit	22.820.000	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Wanggudu	Jumlah Pebaikan Perlatan	34 Unit	22.820.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wanggudu	Jumlah Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor	1 Ruang FO 1 Halaman 1 Drainase	646.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wanggudu	Jumlah Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor	1 Ruang FO 1 Halaman 1 Drainase	646.050.000	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Kebijakan Daerah</b>	<b>1 Perda dan 1 Dokumen</b>	<b>350.000.000</b>	<b>ROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Kebijakan Daerah</b>	<b>1 Perda dan 1 Dokumen</b>	<b>350.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>1 Perda</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>1 Perda</b>	<b>150.000.000</b>	
1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Perda	1 Perda	150.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Perda	1 Perda	150.000.000	
<b>2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Kajian Teknis Penanaman Modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Kajian Teknis Penanaman Modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000.000</b>	
2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Wanggudu	Jumlah Dokumen RUPM	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Wanggudu	Jumlah Dokumen RUPM	1 Dokumen	200.000.000	
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prov. Sultra</b>	<b>Meningkatnya Nilai Investasi</b>	<b>15,12%</b>	<b>154.376.000</b>						
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prov. Sultra</b>	<b>Nilai Investasi</b>	<b>871,05 Milyar</b>	<b>154.376.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prov. Sultra</b>	<b>Nilai Investasi</b>	<b>871,05 Milyar</b>	<b>154.376.000</b>	
1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Kajian	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Kajian	1 Dokumen	100.000.000	
1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kendari	Jumlah Potensi yang Bisa di Promosikan	6 Potensi	54.376.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kendari	Jumlah Potensi yang Bisa di Promosikan	6 Potensi	54.376.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
D	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>278.006.564</b>						
1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>88,81</b>	<b>278.006.564</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>88,81</b>	<b>278.006.564</b>	
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Wanggudu	Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	100%	48.791.763	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Wanggudu	Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	100%	48.791.763	
1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Pantauan Kecamatan	13 Kecamatan	153.990.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Pantauan Kecamatan	13 Kecamatan	153.990.000	
1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Wanggudu	Presentase Aduan Masyarakat yang terselesaikan	100%	45.590.801	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Wanggudu	Presentase Aduan Masyarakat yang terselesaikan	100%	45.590.801	
1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Wanggudu	Jumlah Harmonisasi Kebijakan	2 Kebijakan	29.634.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Wanggudu	Jumlah Harmonisasi Kebijakan	2 Kebijakan	29.634.000	
E	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Presentase Peningkatan Nilai Investasi</b>	<b>15,12%</b>	<b>340.620.375</b>						
1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Wanggudu</b>	<b>Jumlah LKPM</b>	<b>85 Laporan</b>	<b>340.620.375</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Wanggudu</b>	<b>Jumlah LKPM</b>	<b>85 Laporan</b>	<b>340.620.375</b>	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Investasi	7 Kegiatan	56.319.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Investasi	7 Kegiatan	56.319.000	
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Sosialisasi OSS dan LKPM	4 Kegiatan	185.925.375	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Sosialisasi OSS dan LKPM	4 Kegiatan	185.925.375	
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Pengawasan Penanaman Modal	59 Pelaku Usaha	98.376.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wanggudu	Jumlah Pengawasan Penanaman Modal	59 Pelaku Usaha	98.376.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
F	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Media Informasi Elektronik</b>	<b>1 Media</b>	<b>60.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Media Informasi Elektronik</b>	<b>1 Media</b>	<b>60.000.000</b>	
1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Website</b>	<b>1 Media</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>Jumlah Website</b>	<b>1 Media</b>	<b>60.000.000</b>	
1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Wanggudu	Jumlah Website	1 Media	60.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Wanggudu	Jumlah Website	1 Media	60.000.000	

#### **E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat desa, kelurahan sampai tingkat kecamatan tidak ada usulan yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Form Usulan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Perangkat Daerah

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional maka perlu kiranya menelaah berbagai kebijakan nasional dan provinsi guna perumusan Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 antara lain yang tersajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1  
Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)</li> <li>5. Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273)</li> </ol>	Kewenangan Pemrosesan Izin Sebagian Masih Berada di Instansi-Instansi Teknis
2	Pelaksanaan OSS (Online Single Submission)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)</li> </ol>	Proses Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

## **B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Untuk merealisasikan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

Misi adalah rumusan umum yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman;
3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan Visi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ini hanya melaksanakan 1 (Satu) Misi dari 6 (Enam) Misi yang telah ditetapkan yaitu pada Misi Ke 3 (Tiga) “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi”.

Untuk menjalankan tujuan atau misi diatas maka perlu untuk menetapkan sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Investasi Daerah, dengan indikator meningkatnya jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan indikator peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penerbitan izin yang tepat waktu dan penyelesaian aduan masyarakat atas pelayanan perizinan.

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran

Visi : Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (Konasara 2)			
Misi : Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Peningkatan Jumlah LKPM Baik PMA maupun PMDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</li> <li>- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal</li> <li>- Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah</li> <li>- Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>
		Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Informasi Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM Pelayanan Perizinan</li> <li>- Implementasi SOP dan SP</li> <li>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan</li> </ul>
		Penerbitan Izin Tepat Waktu Sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Layanan</li> <li>- Pengadaan dan Peningkatan Sistem Informasi Website DPM-PTSP</li> </ul>
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Aplikasi Mandiri Layanan Perizinan</li> </ul>

### C. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 telah mempertimbangan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :  
Visi : Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (KONASARA)  
Misi ke 3 : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
2. Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu :
  - Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
  - Kewenangan Penerbitan Izin InvestasiUntuk menjabarkan tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mewujudkannya dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan :
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :  
Sub Kegiatan :
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 2.4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :  
Sub Kegiatan :
  - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :  
Sub Kegiatan :
  - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.6. Penyediaan Bahan/Material
- 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan :
  - 5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 5.2. Pengadaan Mebel
  - 5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan :
  - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan :
  - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.2. Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
  - 7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

### Kegiatan :

- 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

#### Sub Kegiatan :

- 1.1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

#### Sub Kegiatan :

- 2.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 1.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 1.2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 1.3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

F. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ada pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8		15
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				6.828.444.272	DAU/PAD /DAK			7.246.839.071
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				6.828.444.272	DAU/PAD /DAK			7.246.839.071
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)	Kab. Konawe Utara / Nasional	BB	5.745.441.333	DAU	-	BB	5.831.839.071
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kab. Konawe Utara	13 Dokumen	40.720.863	DAU	-	13 Dokumen	46.000.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan RKA Perubahan	DPMPTSP Kab. Konut	3 Dokumen	7.500.000	DAU	-	3 Dokumen	8.500.000
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	DPMPTSP Kab. Konut	1 Dokumen	21.753.713	DAU	-	1 Dokumen	25.000.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Sakip	DPMPTSP Kab. Konut	9 Dokumen	11.467.150	DAU	-	9 Dokumen	12.500.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>DPMPTSP Kab. Konut</b>	<b>WTP</b>	<b>2.464.854.809</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>2.474.739.071</b>
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Bulanan ASN	DPMPTSP Kab. Konut	12 Bulan	2.312.749.071	DAU	-	12 Bulan	2.312.749.071
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	DPMPTSP Kab. Konut	12 Bulan	138.990.000	DAU	-	12 Bulan	138.990.000
2.18.01.2.02.06	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan	Prov. Sultra	4 Orang	7.085.000	DAU	-	6 Orang	12.500.000
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	DPMPTSP Kab. Konut	12 Dokumen	6.030.738	DAU	-	12 Dokumen	10.500.000
2.18.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Seragam Dinas dan Jumlah ASN Mengikuti Diklat</b>	<b>DPMPTSP Kab. Konut / Nasional</b>	<b>3 Set 23 Stel 5 Orang</b>	<b>163.489.183</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>3 Set 23 Stel 10 Orang</b>	<b>185.500.000</b>
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas, Adat dan Olah Raga	DPMPTSP Kab. Konut	3 Set 23 Stel	75.635.183	DAU	-	3 Set 28 Stel	85.000.000
2.18.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	Nasional	8 Orang	87.854.000	DAU	-	10 Orang	100.500.000
2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terlaksananya Administrasi Umum</b>	<b>Kab. Konawe Utara/ Nasional</b>	<b>100%</b>	<b>1.375.967.737</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>1.518.500.000</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Kelistrikan	DPMPTSP Kab. Konut	12 Item	16.971.763	DAU	-	15 Item	18.500.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Pendukung Operasional	DPMPTSP Kab. Konut	18 Unit	215.809.000	DAU	-	20 Unit	250.000.000
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Presentase Ketersediaan Perlatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Konut	28 Item	86.410.652	DAU	-	20 Item	75.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	DPMPTSP Kab. Konut	1 Paket ATK 1 Paket Makan Minum	106.121.825	DAU	-	1 Paket ATK 1 Paket Makan Minum	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Konut	3 Item Cetak dan 20.000 Lembar Foto Copy	26.750.000	DAU	-	3 Item Cetak dan 25.000 Lembar Foto Copy	30.000.000
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Bangunan	DPMPTSP Kab. Konut	6 Item Bahan Baku Bangunan	34.417.497	DAU	-	12 Item Bahan Baku Bangunan	75.000.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	Nasional	135 Kegiatan	889.487.000	DAU	-	155 Kegiatan	950.000.000
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penambahan Sarpras</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>4 Paket</b>	<b>600.755.563</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>4 Paket</b>	<b>580.000.000</b>
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penambahan Kendaraan	DPMPTSP Kab. Konut	4 Unit	110.000.000	DAU	-	0 Unit	0
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	DPMPTSP Kab. Konut	18 Unit	158.193.578	DAU	-	16 Unit	145.000.000
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab. Konut	12 Unit	140.561.985	DAU	-	15 Unit	150.000.000
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	DPMPTSP Kab. Konut	1 Koridor 1 Garasi 1 Paket Teralis	192.000.000	DAU	-	1 Taman 1 Ruang Konsultasi	285.000.000
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>100%</b>	<b>258.443.178</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>259.600.000</b>
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	DPMPTSP Kab. Konut	250 Lembar	2.531.250	DAU	-	250 Lembar	2.600.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik dan Internet	DPMPTSP Kab. Konut	12 Bulan	48.911.928	DAU	-	12 Bulan	50.000.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga PKKK	DPMPTSP Kab. Konut	30 Orang	207.000.000	DAU	-	30 Orang	207.000.000
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sarpras yang Mengalami Pemeliharaan</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	<b>3 Paket</b>	<b>841.210.000</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>3 Paket</b>	<b>767.500.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perbaikan Kendaraan Operasional	DPMPTSP Kab. Konut	19 Unit	172.340.000	DAU	-	19 Unit	180.000.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pebaikan Peralatan Kantor	DPMPTSP Kab. Konut	34 Unit	22.820.000	DAU	-	40 Unit	25.500.000
2.18.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor	DPMPTSP Kab. Konut	1 Ruang FO 1 Halaman 1 Drainase	646.050.000	DAU	-	1 Ruang Pengaduan 1 Lanjutan Halaman	562.000.000
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Kebijakan Daerah</b>	Kab. Konawe Utara	<b>1 Perda dan 1 Dokumen</b>	<b>350.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>1 Perda dan 1 Dokumen</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal</b>	Kab. Konawe Utara	<b>1 Perda</b>	<b>150.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>1 Perda</b>	<b>250.000.000</b>
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda	DPMPTSP Kab. Konut	1 Perda	150.000.000	DAU	-	1 Perda	250.000.000
2.18.02.2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kajian Teknis Penanaman Modal</b>	Kab. Konawe Utara	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM	DPMPTSP Kab. Konut	1 Dokumen	200.000.000	DAU	-	0 Dokumen	0
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Nilai Investasi</b>	Kab. Konawe Utara/ Nasional	<b>15,12%</b>	<b>154.376.000</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>16,74%</b>	<b>450.000.000</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Investasi</b>	Kab. Konawe Utara/ Nasional	<b>871,05 Milyar</b>	<b>154.376.000</b>	<b>DAU</b>	<b>-</b>	<b>940,26 Milyar</b>	<b>450.000.000</b>
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kajian	DPMPTSP Kab. Konut	1 Dokumen	100.000.000	DAU	-	1 Dokumen	150.000.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi yang Bisa di Promosikan	Nasional	6 Potensi	54.376.000	DAU	-	6 Potensi	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</b>	<b>Kab. Konawe Utara</b>	Sangat Baik	278.006.564	DAU	-	Sangat Baik	320.000.000
2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Nilai IKM	<b>Kab. Konawe Utara</b>	88,81	278.006.564	DAU	-	88,93	320.000.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	DPMPTSP Kab. Konut	100%	48.791.763	DAU	-	100%	65.000.000
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pantauan Kecamatan	DPMPTSP Kab. Konut	13 Kecamatan	153.990.000	DAU	-	13 Kecamatan	160.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Presentase Aduan Masyarakat yang terselesaikan	DPMPTSP Kab. Konut	100%	45.590.801	DAU	-	100%	50.000.000
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Harmonisasi Kebijakan	DPMPTSP Kab. Konut	2 Kebijakan	29.634.000	DAU	-	2 Kebijakan	45.000.000
2.18.05	<b>ROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi</b>	Kab. Konawe Utara/ Prov. Sultra	15,12%	340.620.375	DAK	-	16,74%	395.000.000
2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah LKPM</b>	Kab. Konawe Utara/ Prov. Sultra	85 Laporan	340.620.375	DAK	-	99 Laporan	395.000.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Investasi	Kab. Konawe Utara	7 Kegiatan	56.319.000	DAK	-	7 Kegiatan	60.000.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi OSS dan LKPM	Kab. Konawe Utara/ Prov. Sultra	4 Kegiatan	185.925.375	DAK	-	4 Kegiatan	220.000.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Konawe Utara	59 Pelaku Usaha	98.376.000	DAK	-	65 Pelaku Usaha	115.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Media Informasi Elektronik</b>	Kab. Konawe Utara	1 Media	60.000.000	DAU	-	1 Media 1 Aplikasi	226.000.000
2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Website</b>	Kab. Konawe Utara	1 Media	60.000.000	DAU	-	1 Media 1 Aplikasi	226.000.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Website	DPMPTSP Kab. Konut	1 Media	60.000.000	DAU	-	1 Media 1 Aplikasi	226.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan perencanaan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis kepada kepentingan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan paradigma baru, mempromosikan potensi dan peluang investasi di daerah dan memberikan kemudahan perizinan berusaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta sasaran program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kedepan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Wanggudu, 5 April 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Konawe Utara,



**MARJONO, S.Pd., M.Si**

Pembina TK.I, Gol. IV/b

NIP. 19690810 200502 1 010